

ABSTRAK

Kota Semarang, sebagai ibu kota Jawa Tengah, menghadapi tantangan dalam menurunkan tingkat kemiskinan meskipun telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) rata-rata sebesar 2,8% per tahun sejak 2018. Ketimpangan spasial, terutama di wilayah pesisir seperti Kecamatan Semarang Utara, Genuk, dan Tugu, menunjukkan bahwa capaian administratif IRB belum sepenuhnya berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas reformasi birokrasi sebagai instrumen tata kelola dalam mengurangi kemiskinan di Kota Semarang menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis skoring, regresi linier, dan Analytic Hierarchy Process.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan di wilayah selatan dan barat mencapai kinerja tata kelola yang efektif dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Sebaliknya, wilayah pusat dan pesisir menunjukkan ketimpangan, di mana tingginya IRB belum diikuti oleh penurunan signifikan tingkat kemiskinan. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur serta tekanan karakteristik wilayah, seperti kepadatan permukiman dan kompleksitas sosial ekonomi. Meskipun terdapat korelasi negatif antara IRB dan tingkat kemiskinan, namun kontribusinya masih rendah. Melalui AHP, peningkatan kompetensi ASN menjadi prioritas utama untuk mengoptimalkan dampak reformasi birokrasi. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN yang lebih baik untuk menciptakan reformasi birokrasi yang responsif dan adaptif guna mengurangi kemiskinan di Kota Semarang secara efektif.

Keyword: Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Kemiskinan